



STRATEGI PENGUSAHA KECIL
NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju BALI ERA BAKSO

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI BALI**



KATA PENGHANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas asung kerta wara nugrahaNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dikarenakan adanya perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan implikasi dari terbitnya kebijakan/peraturan Perundang Undangan yang baru. Perubahan Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, permasalahan, penyelarasan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan daerah/nasional, rumusan program/kegiatan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan, serta penutup. Perubahan Renstra 2018-2023 ini merupakan proses pembangunan 5 (lima) tahunan, dan tersisa 1 (Satu) Tahun, yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan. Penyusunan Perubahan Renstra ini berdasarkan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018-2023, serta dokumen pendukung lainnya.

Akhirnya seraya mengharapkan sumbangan pemikiran dari kita semua maka Perubahan Renstra 2018-2023 yang telah disusun ini kami ajukan sebagai dasar Perencanaan Program pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali guna menjadi landasan operasional dalam melaksanakan program/kegiatan.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS

I Wayan Ekadina

NIP. 19701211 199803 1 005

KATA PENGHANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	5
1.4. Sistematika Penyusunan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI.....	8
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.	8
2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.....	10
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.....	12
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI	17
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	18
3.3. Telaah Renstra K/L.....	18
3.3.1 Telaahan RENSTRA Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia	18
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	19
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	19
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI.....	21
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.....	21
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI	23
BAB VI RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI	25
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII PENUTUP.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan adalah suatu bentuk perencanaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tidak dapat terlepas dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dari masa ke masa, ternyata Negara Indonesia telah mengalami perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan. Setidaknya sejak dimulainya era reformasi, paradigma perencanaan pembangunan berganti dari perencanaan komprehensif menjadi perencanaan strategis. Paradigma perencanaan strategis dipilih oleh pemerintah karena dirasa memiliki manfaat yang jelas dalam jangka waktu yang singkat. Paradigma perencanaan strategis yang dianut oleh pemerintah dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah memiliki nilai lebih dengan adanya pelibatan stakeholders (para pemangku kepentingan) yang menjadikan perencanaan pembangunan daerah menjadi tepat sasaran. Dengan kelebihan tersebut, maka stakeholders dapat berperan aktif dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah di wilayahnya masing-masing, sehingga perencanaan pembangunan daerah berlangsung secara partisipatif. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dan strategis karena Koperasi dan UMKM telah terbukti tidak terpengaruh oleh krisis, ketika krisis melanda pada periode 1997-1998 hanya Koperasi dan UMKM yang dapat kuat bertahan bahkan terus bertambah dan mampu menyerap tenaga kerja. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaannya menggunakan landasan azas kekeluargaan (Pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (Pasal 33 ayat 4). Pembangunan Koperasi dan UMKM juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan amanat beberapa Undang-Undang (UU) yaitu: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Amanat UUD 1945 dan 2 (dua) Undang-Undang tersebut mengarahkan pembangunan Koperasi dan UKM untuk dilaksanakan melalui pendekatan keberpihakan (affirmative) dan pendekatan pengembangan kemandirian. Pendekatan



keberpihakan (affirmative) diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan, serta perlindungan usaha terutama bagi Koperasi dan UMKM yang berkembang di antara masyarakat berpendapatan rendah. Pada saat yang sama, pembangunan Koperasi dan UMKM diarahkan untuk membangun kemandirian dan daya saing melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapan iptek, dan penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis. Pembangunan Koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk memperkuat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian, baik dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam lima tahun ke depan, pemberdayaan Koperasi dan UMKM akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja usaha Koperasi dan UMKM, penguatan dan perluasan peran sistem pendukung usaha dan peningkatan dukungan iklim usaha. Hal ini sejalan dengan tiga tataran pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tataran makro yaitu kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM mencakup perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan Koperasi dan UMKM. Beberapa isu lingkungan usaha diantaranya berkaitan dengan peraturan, persaingan usaha, biaya transaksi, formalisasi usaha, serta peran pemerintah, swasta dan masyarakat.

Bali merupakan salah satu provinsi yang mendapat predikat Provinsi Penggerak Koperasi dari Pemerintah Pusat. Faktor kunci diraihnya predikat tersebut adalah adanya keberpihakan pemerintah daerah terhadap koperasi. Salah satu bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap Koperasi dan UMKM adalah adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini tentu sangat membanggakan semua pihak. Namun demikian, untuk mempertahankan predikat tersebut Pemerintah Bali khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali memerlukan upaya-upaya strategis untuk menyusun dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan unggulan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Untuk menunjang tersebut, diperlukan sebuah dokumen perencanaan resmi yaitu dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai bentuk panduan untuk mengarahkan para aparat pemerintahan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengembangkan sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Bali.



Dokumen RENSTRA ini bersifat jangka pendek dan menengah, namun tetap berpedoman pada format jangka panjang sehingga rumusan visi, misi, dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dapat tercapai sesuai target yang direncanakan. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Provinsi Bali.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

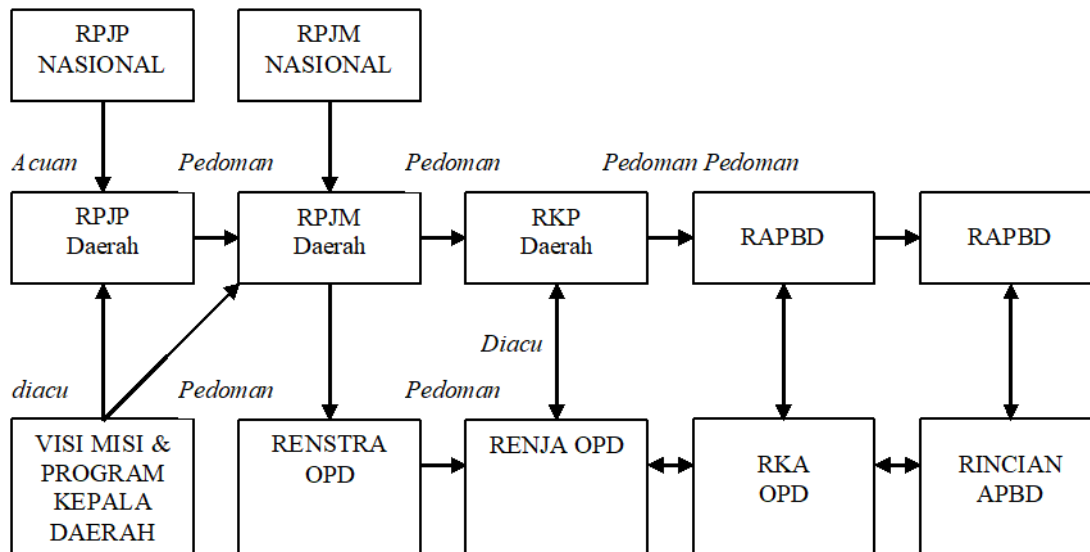


Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3. Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perubahan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mengintegrasikan berbagai dokumen lainnya dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dijadikan pedoman penyusunan pembangunan daerah dan sekaligus dijadikan dasar penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan berisi uraian pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali serta susunan garis besar isi dokumen. Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2018-2023 terdiri dari 8 (delapan) bab sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 :

- Bab I : Pendahuluan**, bab ini mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra, Sistematika Penyusunan Renstra
- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali** mencakup Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Sumber Daya, Kinerja/Capaian Kinerja dan Gambaran Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
- Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis**, mencakup Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, dan Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali**, memuat Tujuan, Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali (Cascading)



- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali,** memuat Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali untuk mencapai Tujuan
- Bab VI : Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali,** memuat Program dan Kegiatan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** memuat keterkaitan misi dan target capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2018-2023
- Bab VIII : Penutup**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor: 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur No 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

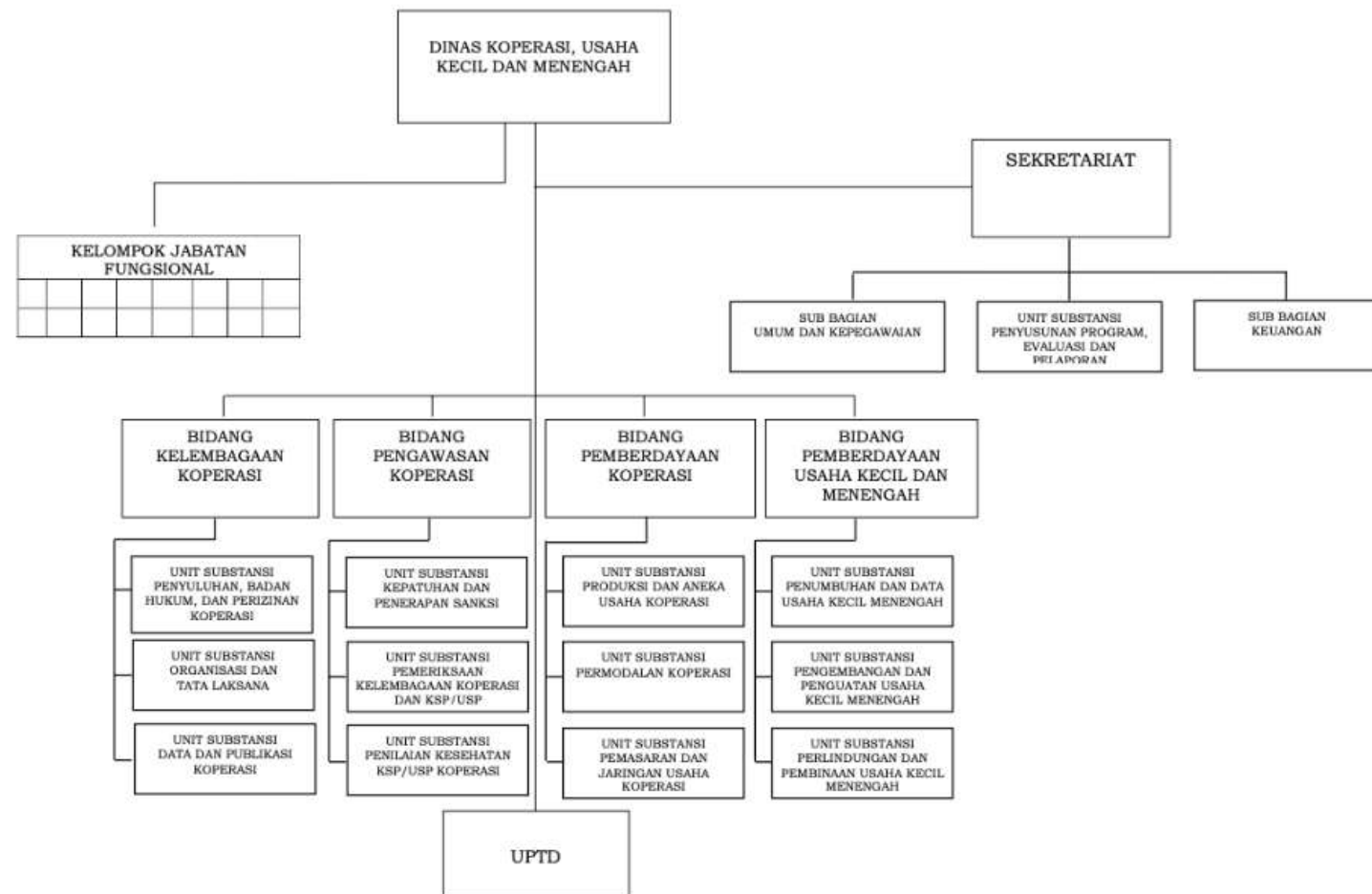
a. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi
- pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi
- penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali



2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
a. Susunan Kepegawaian.

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali posisi per Juni 2021 sebanyak 73 (Tujuh puluh tiga) orang. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai (orang)
1.	Golongan IV	17
2.	Golongan III	49
3.	Golongan II	7
4.	Golongan I	-
	Jumlah :	73

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2021)

Dari tabel di atas jumlah pegawai Golongan IV sebanyak 17 (Tujuh belas) orang, Golongan III sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang, Golongan II sebanyak 7 (tujuh) orang dan Golongan I 1 (satu) orang.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)
	JABATAN STRUKTURAL	
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	6
3.	Eselon IV	5
	JABATAN FUNGSIONAL	
1.	Arsiparis	1
2.	Pejabat Pengadaan	1
3.	Pranata Komputer	1
4.	Sub Koordinator	13
5.	Calon Pengawas	5
		33

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2021)

Berdasarkan tabel 2.2 jumlah pegawai didasarkan pada jabatan yaitu jabatan struktural dan fungsional. Untuk jabatan struktural terdiri dari Pejabat Eselon II sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III sebanyak 6 (enam) orang, Eselon IV sebanyak 5 (lima) orang.



2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	18
2.	Sarjana (S1)	43
3.	Diploma (D3)	2
4.	SLTA	9
5.	SLTP	-
6.	SD	1
	Jumlah :	73

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2021)

Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai yang berpendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 18 (delapan belas) orang, Sarjana (S1) sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, Diploma III (D3) sebanyak 2 (dua) orang, SLTA sebanyak 9 (sembilan) orang dan SD 1 (satu) orang.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Non PNS

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pegawai (orang)
1.	Tenaga Administrasi	41
2.	Sopir	8
3.	Tenaga Teknis/Lapangan	-
4.	Penjaga malam	9
5.	Satpam (Pihak ketiga)	-
6.	Cleaning Service dan tukang kebun (Pihak ketiga)	11
	Jumlah :	69

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2021)

b. Perlengkapan.

Untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi Bali perlu adanya dukungan prasarana dan sarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain :

Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

NO	GOLONGAN	TOTAL		KETERANGAN
		JUMLAH	SATUAN	
1	Tanah	-	M ²	Sudah diserahkan
2	Bangunan Gedung	4	Unit	Kondisi Baik
3	Kendaraan Operasional Roda 4	10	Unit	Kondisi Baik



4	Kendaraan Operasional Roda 2	14	Unit	Kondisi Baik
5	Meja Kerja	231	Unit	Kondisi Baik
6	Kursi Kerja	229	Unit	Kondisi Baik
7	Komputer	31	Unit	Kondisi Baik
8	Printer	24	Unit	Kondisi Baik
9	Filling Cabinet	29	Unit	Kondisi Baik
10	Rak Kaca/Kayu	23	Unit	Kondisi Baik
11	Lemari Besi/Kayu	24	Unit	Kondisi Baik
12	AC	62	Unit	Kondisi Baik
13	Zice	9	Unit	Kondisi Baik
14	Kursi Tamu	12	Unit	Kondisi Baik
15	Alat Kantor Lainnya	3	Unit	Kondisi Baik

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2021)

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Hasil-hasil pelaksanaan Program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2016-2021 diuraikan dalam bagian perkembangan Koperasi dan UKM Provinsi Bali, serta pencapaian target-target indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Pencapaian ini memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan yang sudah ada dan penyusunan kebijakan baru dalam rangka memfasilitasi koperasi dan UKM untuk semakin mandiri dan berdaya saing.

a. Perkembangan Koperasi

Perkembangan kelembagaan dan usaha koperasi di Provinsi Bali ditampilkan dalam tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7. Perkembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

NO	INDIKATOR	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	JUMLAH KOPERASI	4995	4850	4882	5027	5119	5258
2	KOPERASI AKTIF	4472	4283	4268	4005	4090	3625
3	JUMLAH ANGGOTA KOPERASI	1.014.635	1.059.943	1.088.338	1.109.918	1.089.286	1.125.339

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2016-2021, diolah)

Berdasarkan tabel perkembangan kelembagaan dan usaha koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut :



- a. Jumlah koperasi di Povinsi Bali tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 145 koperasi dan di tahun 2021 mengalami kenaikan pesat dalam pertumbuhan jumlah koperasi, hal tersebut disebabkan karena adanya kebijakan Gubernur Bali terkait pembentukan koperasi di sektor-sektor produktif untuk meningkatkan daya saing dan mempermudah pemasaran produk anggota koperasi khususnya petani maupun pengerajin.
- b. Tahun 2019-201 terjadi kenaikan pesat terhadap koperasi yang tidak aktif yang disebabkan penurunan kinerja koperasi dan maraknya koperasi yang bermasalah yang diakibatkan oleh tidak profesionalnya pengurus koperasi dan dampak pandemi covid 19.
- c. Perkembangan jumlah anggota koperasi selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin sadar akan berkoperasi dan pentingnya berkoperasi untuk memajukan kesejahteraan bersama para anggotanya. Namun di tahun 2020-2021 terjadi penurunan anggota dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan permasalahan ekonomi sehingga banyak anggota tidak bisa membayar iuran dan memutuskan untuk mundur menjadi anggota.

Saat ini Pemerintah lebih menekankan pada kualitas koperasi, bukan pada kuantitas koperasi (Re-orientasi Koperasi). Meningkatkan jumlah anggota koperasi lebih baik dibandingkan meningkatkan jumlah koperasi tapi tidak berkualitas. Untuk meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas dilakukan melalui program Rehabilitasi koperasi yaitu pembaharuan organisasi koperasi melalui pemuktahiran data dan pembekuan, akan ditindaklanjuti dengan pembubaran koperasi.

b. Perkembangan UKM

Perkembangan UKM di Provinsi Bali semakin meningkat (Tabel 2.8). Peningkatan jumlah UKM tersebut disebabkan karena program penumbuhan kewirausahaan telah digaungkan melalui dunia pendidikan baik pendidikan formal dan pendidikan informal dengan perubahan pola pikir setelah tamat dari Perguruan Tinggi tidak harus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwirausaha. Untuk mewujudkan pembentukan wirausaha baru berbagai jalur yang ditempuh oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain melalui pelaksanaan pelatihan, magang, studi banding, temu usaha, promosi, studi banding, dan penyebaran publikasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Namun demikian, sebagian besar UKM sifatnya masih usaha informal. Untuk itu, pemerintah perlu membantu usaha informal untuk berkembang menjadi usaha formal dan usaha formal berkembang untuk melakukan ekspor. Hal



tersebut diwujudkan dalam bentuk pendampingan dan pembinaan kepada pelaku UKM melalui Konsultan Pendamping PLUT KUMKM Provinsi Bali. PLUT KUMKM Provinsi Bali adalah program pengembangan yang diharapkan mampu mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya produktif, yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholders terkait dalam rangka penyediaan jasa layanan bagi pengembangan usaha KUMKM. PLUT KUMKM Provinsi Bali menyediakan layanan konsultasi bisnis KUMKM, pendampingan atau mentoring bisnis (pendampingan secara regular khususnya untuk KUMKM yang ingin naik kelas dan membenahi masalah-masalah usaha yang dihadapi), fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran dan promosi, pelatihan bisnis, networking, dan layanan pustaka entrepreneur.

Tabel 2.8. Perkembangan UKM Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah UKM Formal	61.648	73.081	77.082	82.777	82.214	75.664
2	Jumlah UKM Informal	203.910	227.569	235.885	243.232	245.139	336.601
3	Total Jumlah UKM	265.558	300.650	312.967	326.009	327.353	412.265

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2016-2021, diolah)



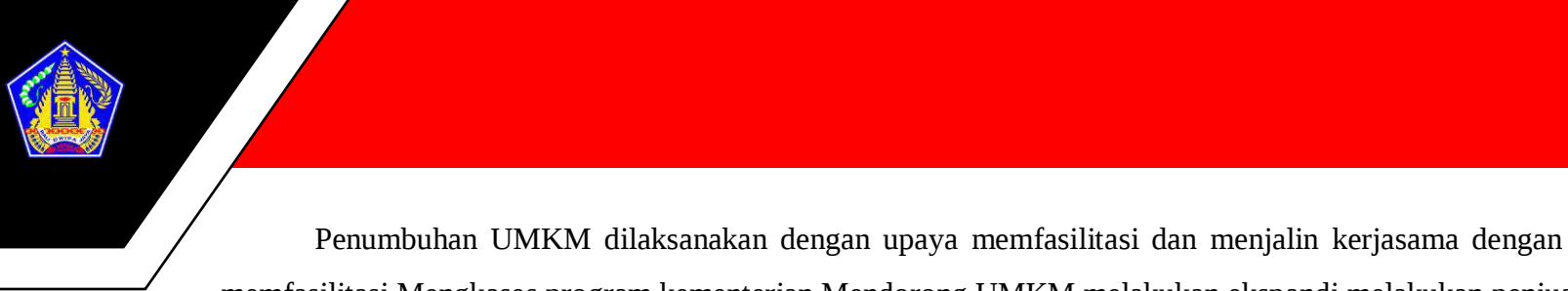
c. Pencapaian Kinerja IKU

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2023	Capaian 2021 terhadap target akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	1. Persentase peningkatan produktivitas Koperasi	8,35%	6,27%	9,17%	146%	7,50%	122%
		2. Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi	-	50	117	234%	-	-
2	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	7,71%	8,38%	9,55%	113	9,57	99,79

Catatan : Indikator Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi untuk tahun 2022-2023 akan dihilangkan dikarenakan indikator bersifat mikro dan lebih cocok menjadi indikator program dibandingkan untuk menjadi indikator sasaran Dinas

Peningkatan produktivitas koperasi adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar pelaku usaha. Melalui pembinaan dan pengembangan sektor koperasi diharapkan upaya peningkatan usaha ekonomi produktif akan lebih efisien dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Capaian ini bisa diwujudkan dengan melakukan aktivitas melaksanakan temu konsultasi dengan lembaga keuangan Bank dan Non Bank, sosialisasi dan pemanfaatan KUR dan skim-skim kredit lainnya.



Penumbuhan UMKM dilaksanakan dengan upaya memfasilitasi dan menjalin kerjasama dengan gojek atau dengan start-up lainnya dan berupaya memfasilitasi Mengkases program kementerian,Mendorong UMKM melakukan ekspandi melakukan penjualan melalui Online melalui marketplace.

d. Gambaran Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jika dilihat dari table dibawah ini anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dari tahun ke tahun selama 2016-2021 mengalami peningkatan dan penurunan secara signifikan hal tersebut dipengaruhi kondisi keuangan daerah. Persentase Rasio Realisasi dan Anggaran selama 2016-2021 setiap tahunnya mengalami fluktuasi walaupun realisasi setiap tahunnya tidak mencapai 100% dari anggaran yang ditentukan, hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan juga perbedaan harga di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan harga riil di lapangan.

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Uraian Koperasi dan UKM	Rp 9.534.314.975	Rp 9.803.786.120	Rp 8.448.304.578	Rp 10.088.608.832	Rp 7.744.034.720	Rp 19.574.805.601	Rp 8.785.635.185	Rp 9.393.298.382	Rp 7.767.975.664	Rp 9.646.386.245	Rp 7.312.370.547	Rp 17.602.062.572

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
14	15	16	17	18	19	20	21
92,15	95,81	91,95	95,62	94,43	89,92	58,34%	57,27%



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Keberadaan dan peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam menggerakkan sektor riil merupakan realitas dalam kegiatan ekonomi nasional yang sangat penting dan strategis. Hal ini terbukti oleh penguatan terhadap ekonomi skala kecil dan menengah dipandang menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan untuk menopang ekonomi nasional yang kuat dan terciptanya fundamental ekonomi yang tangguh. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan terhadap peningkatan kualitas koperasi, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah (UKM). Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor koperasi dan UKM menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam pemberdayaan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

- a. Belum optimalnya kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
- b. Terbatasnya kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses permodalan atau pembiayaan, akses informasi pasar dan jaringan pemasaran.
- c. Belum optimalnya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan KUKM sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan.
- d. Rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses informasi para pelaku UKM. Sebagian besar UKM belum memiliki kapasitas kewirausahaan



yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis UKM yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar.

- e. Rendahnya pertumbuhan usaha dan daya saing UMKM

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu : *"Nangun Sat Kerthi Loka Bali"* melalui *Pola Pembangunan Semesta Berencana*, dimana dalam *Membangun Era Baru: Kondisi Bali Dengan Tataan Kehidupan Baru Yang Holistik Mencakup Tiga Dimensi*, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mendukung misi yang ke 17 yaitu *Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali*.

3.3. Telaah Renstra K/L

Sasaran jangka menengah RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing SKPD di lingkungannya.

3.3.1 Telaahan RENSTRA Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 harus memperhatikan Renstra kementerian/lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sebagai acuan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bali, dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Tabel 3.1 Telaah terhadap Sasaran Renstra K/L

No	INDIKATOR KINERJA	SASARAN RENSTRA DINAS	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN KUMKM RI
1	Persentase KUMKM Menuju Digital	25,25-26,5% KUMKM Menuja Digital	500 Koperasi Modern 16% Persentase Usaha Mikro Bertransformasi dari Informal ke Formal



2	Persentase Peningkatan Produktifitas Koperasi	6,27% Peningkatan Produktifitas Koperasi	20% Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
4	Rasio Kewirausahaan	8,38% Rasio Kewirausahaan Provinsi Bali	3,30%-3,95% Rasio Kewirausahaan Nasional

3.4. Telaah Renacana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berbudaya Bali berwawasan lingkungan dan berlandaskan Tri Hita Karana dengan tujuan : 1) terwujudnya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 2) terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, termasuk ruang bumi. 3) terwujudnya keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah proinsi dan kabupaten/kota; dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan dan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang; 4) terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 5) terwujudnya keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah kabupaten/kota dan kegiatan antar sector, selain itu adalah terwujudnya pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap mitigasi dan adaptasi bencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16), terdapat penetapan kawasan strategis yang dilakukan berdasarkan kepentingan (1) pertumbuhan ekonomi; (2) sosial dan budaya Bali; dan (3) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan penetapan kawasan strategis di berbagai sektor tersebut menyebabkan akan terjadi dinamisasi masyarakat baik dari dalam maupun dari luar wilayah. Kondisi demikian merupakan potensi besar terjadinya masalah-masalah perokonomian dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan penyelenggaraan percepatan perekonomian yang unggul dan mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien terhadap permasalahan perekonomian yang terjadi di masyarakat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali; Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L dan identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:



1. Masih rendahnya daya saing dan produktifitas koperasi dan UMKM di Bali
2. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi
3. Belum optimalnya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan KUMKM sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan dalam peningkatan kelas usaha koperasi dan UMKM
4. Masih terbatasnya akses koperasi dan UKM dalam pembiayaan dan permodalan.
5. masih kurangnya kerjasama kemitraan ekonomi dan bisnis yang melibatkan KUMKM di Bali.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tidak terlepas dari visi, misi Pemerintah Republik Indonesia, Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, cita-cita dan acuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, visi misi Gubernur Provinsi Bali beserta program-program yang dijanjikannya selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) adalah meningkatkan kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka kemandirian perekonomian daerah dengan indikator Persentase KUMKM Menuju Digital.

Berdasarkan tujuan di atas, dikembangkanlah 2 (dua) sasaran beserta indikator yaitu :

- a. Sasaran 1 : Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Profesional
Indikator : Persentase Peningkatan Produktivitas Koperasi
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kemandirian Wirausaha UMKM
Indikator : Rasio Kewirausahaan.



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		TARGET KINERJA PADA TAHUN				
	URAIAN	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kinerja dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja Koperasi yang profesional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	-	5,70%	6,27%	6,85%	7,50%
		Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi	-	-	50 KUMKM	-	-
	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	-	7,71%	8,38%	9,56%	9,57%

Catatan : Indikator Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi untuk tahun 2022-2023 akan dihilangkan dikarenakan indikator bersifat mikro dan lebih cocok menjadi indikator program dibandingkan untuk menjadi indikator sasaran Dinas



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.



Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM)	1. Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kapasitas SDM pengelola KUMKM Melalui Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Pengelola KUMKM dan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi
		2. Penguatan Kelembagaan Usaha Melalui Kemitraan Investasi Berbasis Keterkaitan Usaha	2. Fasilitasi dan dukungan pemasaran bagi KUKM
		3. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Perluasan Skema Pembiayaan	3. Pengembangan Pembiayaan KUMKM berupa Pengembangan Lembaga Keuangan Koperasi dan Peningkatan Peran Pembiayaan Perbankan
	2. Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Jangkauan Pemasaran	1. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan
			2. Pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata
			3. Pengembangan kewirausahaan melalui upaya menaikkelaskan UMKM

BAB VI

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

Bab ini menyajikan rumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran yang menjelaskan tentang strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan *outcome*. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (*output*) dari kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 6.1 Rumusan Program/Kegiatan beserta rumusan indikator sebelum Perubahan Renstra

TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023					
							Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Meningkatkan Kinerja dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang profesional dan akuntabel	Jumlah koperasi yang bankable	2.11.2.11.01.01.02	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi		154 Unit	859.672.462,00	52	1.550.500.000,00	58	-	-	-	-	-	-	7.597.450.000,00	322	Bidang Kelembagaan Koperasi	9 (sembilan) Kab/Kota



		Persentase Koperasi yang aktif dan RAT	2.11.2.11.0 1.01.02.02.	Peningkatan Jumlah Koperasi yang Berkualitas dan Berkinerja dengan Baik	Jumlah koperasi yang aktif dan RAT	15	157.373.466,00	15	450.000.000,00	10	-	-	-	-	-	-	653.400.000,00	23		
			2.11.2.11.0 1.01.02.03.	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Database Koperasi	20	123.638.832,00	20	550.000.000,00	30	-	-	-	-	-	-	798.600.000,00	30		
			2.11.2.11.0 1.01.02.01.	Penumbuhan dan Pengembangan Koperasi	Jumlah koperasi yang tumbuh dan terbentuk	19	224.670.164,00	17	550.500.000,00	18	-	-	-	-	-	-	787.700.000,00	24		
			2.11.2.11.0 1.01.04.	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	78 Unit	242.575.798,00	99	370.616.276,00	118	-	-	-	-	-	-	1.850.626.049,00	157	Bidang Pengawasan Koperasi	9 (sembilan) Kab/Kota
			2.11.2.11.0 1.01.04.01.	Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi	Jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan dan penerapan sanksi koperasi	50	121.181.900,00	50	115.000.000,00	52	-	-	-	-	-	-	157.300.000,00	60		
			2.11.2.11.0 1.01.04.02.	Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya	25	94.272.116,00	25	105.616.276,00	28	-	-	-	-	-	-	145.200.000,00	37		
			2.11.2.11.0 1.01.04.03.	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi	135	166.481.782,00	135	150.000.000,00	118	-	-	-	-	-	-	261.161.029,00	157		



					yang dinilai kesehatan nya															
		Persentase peningkatan produktivitas koperasi	2.11.2.11.01.01.05.	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	62 Unit	199.910.798,00	104	481.079.202,00	104	-	-	-	-	-	-	11.991.380.756,00	128	Bidang Pemberdayaan Koperasi	6 (enam) Kab
			2.11.2.11.01.01.05.02.	Peningkatan Penyediaan Permodalan, Akses Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi	Jumlah koperasi yang mengakses permodalan	50	223.424.416,00	50	190.000.000,00	60	-	-	-	-	-	-				
			2.11.2.11.01.01.05.03.	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi	Jumlah koperasi yang produknya dikenal	4	96.531.966,00	4	191.079.202,00	6	-	-	-	-	-	-				
			2.11.2.11.01.01.05.01.	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	Jumlah koperasi yang bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	50	74.374.416,00	50	100.000.000,00	60	-	-	-	-	-	-				
				Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (BLUD-KUKM) Provinsi Bali	Jumlah KUKM yang mendapat bantuan permodalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				



			2.11.2.11.0 1.02.08.	Program Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM KUKM	Jumlah Pengelola KUKM yang kompeten dan bersertifikasi	550	387.943.248,0 0	50	1.015.531.89 7,00	50	-	-	-	-	-	-	4.698.975. 226,00	800	UPTD Diklat KUKM + Kegiatan Rutin	Kota Denp asar
			2.11.2.11.0 1.02.08.13	Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM	Jumlah pengurus/p engelola KUKM yang mengikuti diklat pengelolaan KUKM	50 KUM KM	108.502.832, 00	50 KUM KM	634.752.03 4,00	50	-	-	-	-	-	-	854.511.119, 00	50 KUM KM		
			2.11.2.11.0 1.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	75 lemb ar	315.000,00	75 lemb ar	829.000,00	80 lemb ar	-	-	-	-	-	-	1.210.000 ,00	80 lemb ar		
			2.11.2.11.0 1.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi air dan listrik	3 jenis	31.910.000,0 0	3 jenis	32.000.000, 00	3 jenis	-	-	-	-	-	-	42.592.00 0,00	3 jenis		
			2.11.2.11.0 1.02.08.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	30 jenis	3.939.000,00	28 jenis	4.000.000,0 0	30 jenis	-	-	-	-	-	-	5.324.000 ,00	30 jenis		
			2.11.2.11.0 1.02.08.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar fotokopi	6300 lemb ar	1.260.000,00	6300 lemb ar	2.000.000,0 0	6500 lemb ar	-	-	-	-	-	-	2.662.000 ,00	6500 lemb ar		
			2.11.2.11.0 1.02.08.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis instalasi listrik	10 jenis	2.027.000,00	10 jenis	2.027.000,0 0	12 jenis	-	-	-	-	-	-	3.025.000 ,00	12 jenis		
			2.11.2.11.0 1.02.08.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah jenis bahan bacaan	1 jenis	840.000,00	1 jenis	840.000,00	2 jenis	-	-	-	-	-	-	1.100.000 ,00	2 jenis		



				Perundang-undangan																
			2.11.2.11.0 1.02.08.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman	2 jenis	2.625.000,00	2 jenis	2.625.000,00	2 jenis	-	-	-	-	-	-	3.630.000,00	2 jenis		
			2.11.2.11.0 1.02.08.08	Upacara Keagamaan	Jumlah jenis upacara keagamaan	5 jenis	18.000.000,00	5 jenis	18.000.000,00	5 jenis	-	-	-	-	-	-	22.990.000,00	5 jenis		
			2.11.2.11.0 1.02.08.09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis jasa pemeliharaan Gedung kantor dan jasa keamanan	3 jenis	161.685.000,00	3 jenis	226296740,00	3 jenis	-	-	-	-	-	-	297000000,00	3 jenis		
			2.11.2.11.0 1.02.08.10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 jenis	43.314.416,00	2 jenis	69.637.123,00	2 jenis	-	-	-	-	-	-	90.750.000,00	2 jenis		
			2.11.2.11.0 1.02.08.11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	4 jenis	7.525.000,00	4 jenis	7.525.000,00	4 jenis	-	-	-	-	-	-	9.680.000,00	4 jenis		
			2.11.2.11.0 1.02.08.12	Rapat Konsolidasi dan Penyusunan Program Diklat SDM KUMKM	Laporan rapat konsolidasi dan penyusunan program diklat SDM KUMKM	1 dokumen	6.000.000,00	1 dokumen	15000000,00	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	19965000,00	1 dokumen		



			2.11.2.11.0 1.01.03.	Program Pengembangan Kelembagaan Subak Sebagai Koperasi Tani	Jumlah subak sebagai koperasi tani	1 Unit	-	1	500.000.000,00	1	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000,00	7	Bidang Kelembagaan Koperasi	6 (enam) Kab
			2.11.2.11.0 1.01.03.01.	Pengembangan Koperasi Subak	Jumlah koperasi subak yang aktif	-	-	-	500.000.000,00	1	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00	1		
			2.11.2.11.0 1.01.06.	Program Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun	Jumlah koperasi tenun yang aktif	1 Unit	-	1	800.000.000,00	1	-	-	-	-	-	-	3.200.000.000	1	Bidang Pemberdayaan Koperasi	6 (enam) Kab
			2.11.2.11.0 1.01.06.01.	Pemberdayaan Koperasi Tenun	Jumlah koperasi tenun yang aktif	-	-	-	800.000.000,00	1	-	-	-	-	-	-	800.000.000,00	1		
	Meningkatnya Ketangguhan dan Kemandirian Wirausaha dari Pelaku UMKM	Jumlah Peningkatan Kelas Usaha UMKM		Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang bankable	70 Unit	541.779.710,00	169	1.630.000.000,00	180	-	-	-	-	-	-	7.400.000.000,00	919	Bidang Pemberdayaan UKM	6 (enam) Kab
		Jumlah UMKM yang Bankable		Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	50	70.159.416,00	50 UMK M	260.000.000,00	50	-	-	-	-	-	-	346.060.000,00	50		
				Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha	Jumlah UMKM yang melakukan kesepakatan	104	771.628.878,00	104 UMK M	1.150.000.000,00	300	-	-	-	-	-	-	1.431.120.000,00	350		



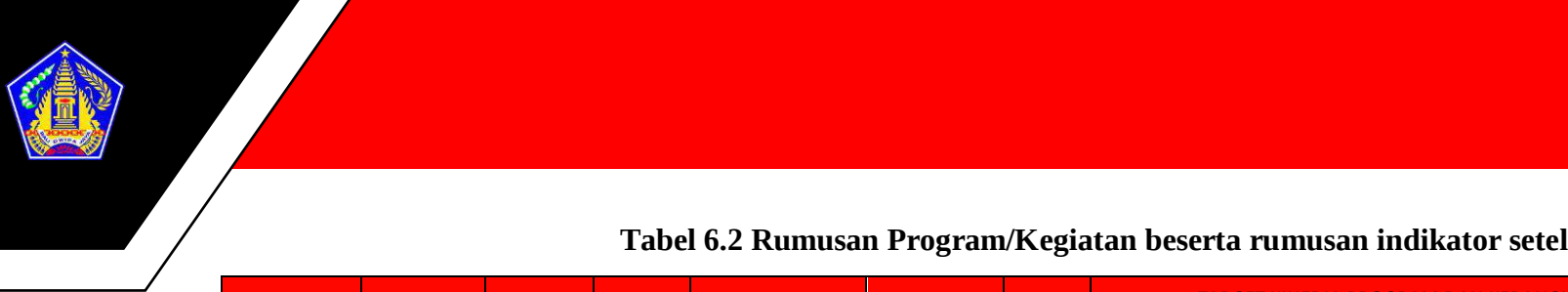
				Mikro, Kecil dan Menengah	n/kerjasama															
				Peningkatan Akses Perizinan dan Pembinaan UKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan	25	83.262.100,00	25 UMKM	220.000.000,00	25	-	-	-	-	-	-	292.820.000,00	25		
				Pendampingan PLUT terhadap KUMKM	Jumlah KUMKM yang didampingi	-					-	-	-	-	-	-				
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali Melalui Dukungan Program /Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja			Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	82,15	2.161.826.400	82,15	2.882.855.756,00	82,5	-	-	-	-	-	-	14.617.109.872,00	84	Sekretariat	



			2.11.2.11.0 1.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	250 lamb ar	1.260.000.00	250 lamb ar	1.260.000,0 0	350 lamb ar	-	-	-	-	-	-	1.983.000 ,00	350 lamb ar		
			2.11.2.11.0 1.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik	3 jenis	210.000.000	3 jenis	210.000.00 0,00	3 jenis	-	-	-	-	-	-	319.500.0 00,00	3 jenis		
			2.11.2.11.0 1.01.01.04.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	37 jenis	50.500.000	37 jenis	58.075.000, 00	40 jenis	-	-	-	-	-	-	87.285.00 0,00	40 jenis		
			2.11.2.11.0 1.01.01.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	2 jenis	15.000.000	2 jenis	19.000.000, 00	2 jenis	-	-	-	-	-	-	28.500.00 0,00	2 jenis		
			2.11.2.11.0 1.01.01.06.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis instalasi listrik	17 jenis	10.000.000	17 jenis	12.467.250, 00	20 jenis	-	-	-	-	-	-	19.800.00 0,00	20 jenis		
			2.11.2.11.0 1.01.01.07.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	7 jenis	27.000.000	7 jenis	31.860.000, 00	7 jenis	-	-	-	-	-	-	47.610.00 0,00	7 jenis		
			2.11.2.11.0 1.01.01.08.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman	2 jenis	12.250.000	2 jenis	14.087.500, 00	2 jenis	-	-	-	-	-	-	21.160.00 0,00	2 jenis		
			2.11.2.11.0 1.01.01.09.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah jenis perjalanan Dinas	2 jenis	319.100.000	2 jenis	340.924.00 0,00	2 jenis	-	-	-	-	-	-	550.000.0 00,00	2 jenis		

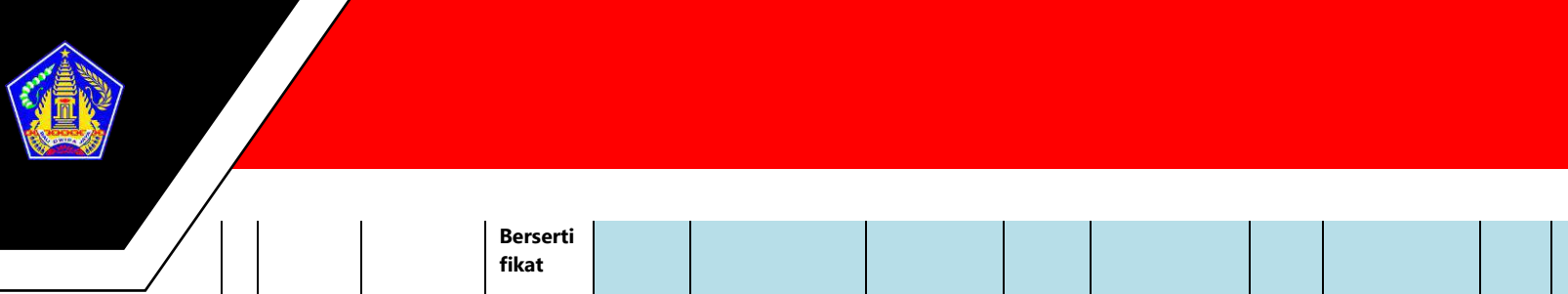


			2.11.2.11.0 1.01.01.10.	Upacara Keagamaan	Jumlah jenis upacara keagamaan	18 jenis	75.000.000	18 jenis	75.000.000, 00	18 jenis	-	-	-	-	-	-	120.000.0 00,00	18 jenis		
			2.11.2.11.0 1.01.01.13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	3 jenis	353.822.992	3 jenis	715.262.23 5,00	3 jenis	-	-	-	-	-	-	1.174.240 .125,00	3 jenis		
			2.11.2.11.0 1.01.01.16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemelihara an gedung kantor	3 jenis	25.000.000	2 jenis	635.440.44 7,00	3 jenis	-	-	-	-	-	-	965.425.0 00,00	3 jenis		
			2.11.2.11.0 1.01.01.17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 jenis	425.886.496	3 jenis	604.476.32 4,00	2 jenis	-	-	-	-	-	-	925.750.0 00,00	2 jenis		
			2.11.2.11.0 1.01.01.20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkap an kantor	2 jenis	619.139.096	2 jenis	35.000.000, 00	2 jenis	-	-	-	-	-	-	54.000.00 0,00	2 jenis		
			2.11.2.11.0 1.01.01.24.	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaa n	2 doku men	116.244.332	2 doku men	70.000.000, 00	2 Dok ume n	-	-	-	-	-	-	106.500.0 00,00	2 doku men		
			2.11.2.11.0 1.01.01.25.	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Koordinasi	Laporan hasil monev program/ke giatan Koperasi dan UKM	1 doku men	-	-	60.000.000, 00	1 doku men	-	-	-	-	-	-	91.252.50 0,00	1 doku men		



Tabel 6.2 Rumusan Program/Kegiatan beserta rumusan indikator setelah Perubahan Renstra

TUJUAN		SASARAN	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	LOKASI
								2021		2022		2023					
								Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		
	1	2	3	4	5	6	7	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Menin gkatny a Kinerja dan Daya Saing Kopera si, Usaha Kecil dan Menen gah (KUKM)	Terwujud nya tata kelola organisas i dan kinerja koperasi yang profesio nal dan akuntabe l	1. Persent ase peningk atan produkt ivitas koperas i	2.17.0 2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang bankable	-	243.089.450,00	59,26	255.064.240,00	83,33 Pers en	267.817.452,00	86,49 Persen	267.817.452,00	86,49 Pers en	Dinas Kope rasi, Usah a Kecil dan Mene ngah Provi nsi Bali	9 Kab/ Kota Se Bali
			2. Jumlah Pengelo la KUMKM yang Berkom peten dan	2.17.02. 1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha	-	218.089.650,00	64 kope rasi	17.956.000,00	71 kope rasi	18.853.800,00	12 Unit Usaha	18.853.800,00	12 Unit Usa ha		



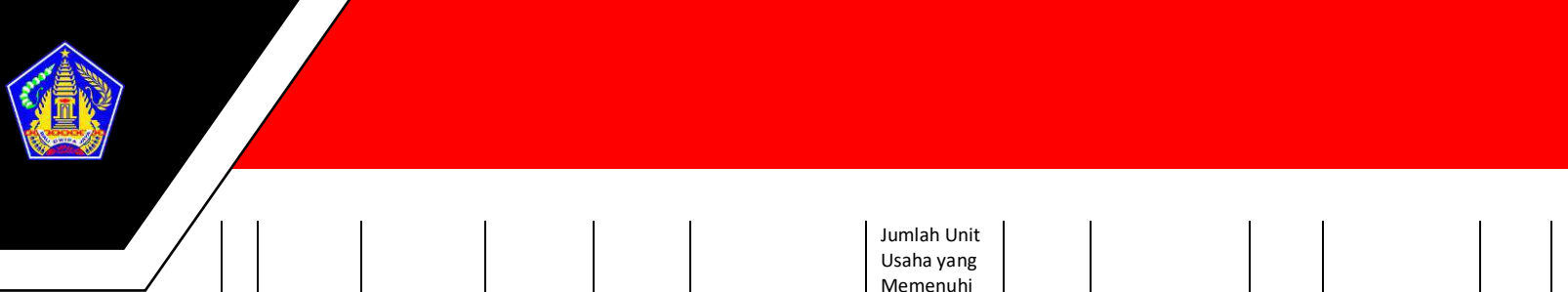
			Bersertifikat														
				2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	-	218.089.650,00	64 kope rasi	17.956.000,00	71 kope rasi						
						Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam						18.853.800,00	12 Unit Usaha	18.853.800,00	12 Unit Usaha		
				2.17.02.1.02.	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu	-	24.999.800,00	5 kope rasi	237.108.240,00	5 kope rasi	248.963.652,00	3 Unit Usaha	248.963.652,00	3 Unit Usaha		



					Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												
				2.17.02.1.02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	-	24.999.800,00	5 kope rasi	237.108.240,00	5 kope rasi						
						Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						248.963.652,00	3 Unit Usaha	248.963.652,00	3 Unit Usaha		



				2.17.06.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi / koperasi tenun / koperasi subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swa sta	-	583.089.605,00	3,08	468.864.290,00	3,08 Persen	492.307.504,50	3,13 Persen	492.307.504,50	3,13 Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	9 Kab/Kota Se Bali
				2.17.06.1.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	-	583.089.605,00	126 kope rasi	468.864.290,00	126 kope rasi	492.307.504,50	124 Unit Usaha	492.307.504,50	124 Unit Usaha		
				2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi permodalan dan Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi temu mitra	-	337.853.639,00	60 kope rasi	315.246.554,00	60 kope rasi						



					Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha						331.008.881,70	60 Unit Usaha	331.008.881,70	60 Unit Usaha		
				2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkatkan aset dan omsetnya	-	245.235.966,00	64 kope rasi	153.617.736,00	64 kope rasi					
						Jumlah koperasi tenun yang aktif	-		1 kope rasi		1 kope rasi					
						Jumlah subak sebagai koperasi tani	-		1 kope rasi		1 kope rasi					
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan					161.298.622,80	64 Unit Usaha	161.298.622,80	64 Unit Usaha		



					Restrukturisasi Usaha												
				2.17.03.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas	-	209.952.106,00	61,32		66,98 Persen	-		-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	9 Kab/Kota Se Bali
				2.17.03.1.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP yang akuntabel	-	149.952.496,00	85 koperasi		90 Koperasi	-	-	-	0		
				2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah koperasi yang akuntabel	-	77.476.148,00	30 koperasi		33 Koperasi						
				2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi	Jumlah koperasi yang	-	72.476.348,00	55 koperasi		57 Koperasi						



					terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	mematuhi perundang-undangan perkoperasian											
						Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel											
				2.17.03.1.02	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP yang tumbuh sehat dan mandiri	-	59.999.610,00	45 KSP/ USP- Kope rasi		52 KSP/ USP Kope rasi	-	-	-	0		
				2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan,	Jumlah KSP/USP Koperasi yang akuntabel	-	59.999.610,00	45 KSP/ USP- Kope rasi		52 KSP/ USP Kope rasi						



					dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat kepada Anggota KUKM dan Masyarakat											
				2.17.04.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	-	127.476.198,00	72,22	118.552.896,00	78,89 Persen	124.480.540,80	87,22 Persen	124.480.540,80	87,22 Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	9 Kab/Kota Se Bali
				2.17.04.1.01	Kegiatan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP yang tumbuh sehat dan mandiri	-	127.476.198,00	130 KSP/USP-Koperasi	118.552.896,00	142 KSP/USP-Koperasi	124.480.540,80	100 Unit Usaha	124.480.540,80	100 Unit Usaha		



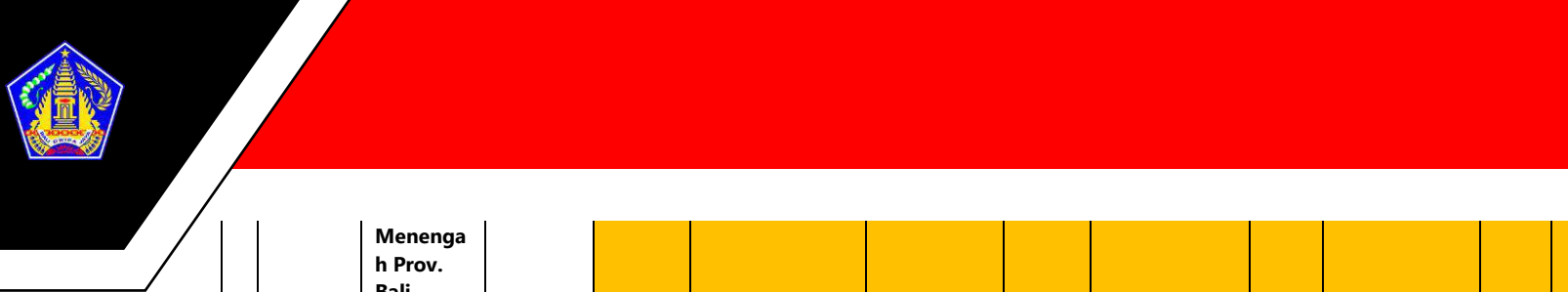
				2.17.04.1.01.01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	-	77.476.248,00	30 KSP/ USP- Kope rasi								
				2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang sehat	-	49.999.950,00	100 KSP/ USP- Kope rasi	118.552.896,00	100 KSP/ USP- Kope rasi						
						Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan						124.480.540,80	100 Unit Usaha	124.480.540,80	100 Unit Usaha		
				2.17.05.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	-	3.392.755.626,00	0,25	3.844.528.896,00	0,25 Persen	4.036.755.340,80	0,30 Persen	4.036.755.340,80	0,30 Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	9 Kab/ Kota Se Bali
				2.17.05.1.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pengelola KUMKM yang berkompeten	-	3.392.755.626,00	990 orang	3.844.528.896,00	50 orang	4.036.755.340,80	990 Orang	4.036.755.340,80	990 Orang		



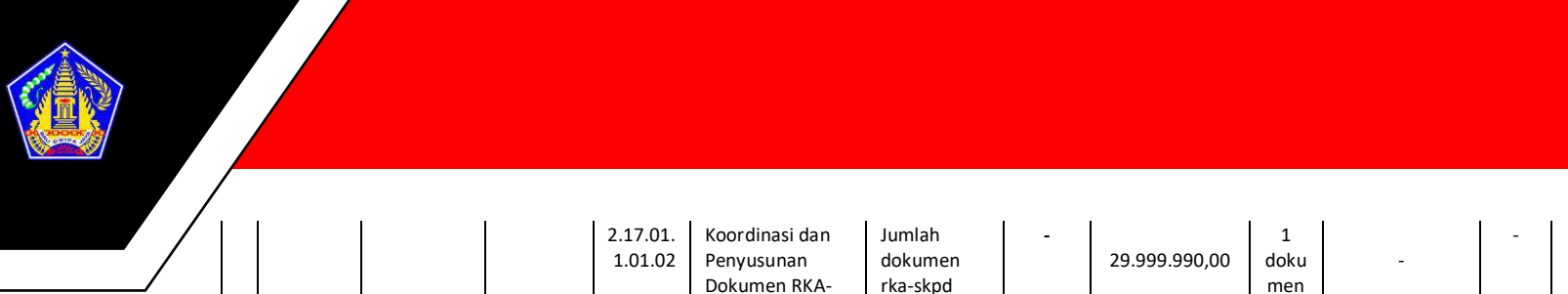
					dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
				2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten	-	3.392.755.626,00	990 orang	3.844.528.896,00	50 orang						
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian						4.036.755.340,80	990 Orang	4.036.755.340,80	990 Orang		
		Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	2.17.07.	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang bankable	-	601.178.890,00	0,06	609.048.900,00	0,12 Persen	639.501.345,00	0,13 Persen	639.501.345,00	0,13 Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	9 Kab/Kota Se Bali
				2.17.07.1.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkat kelas usahanya	-	601.178.890,00	185 UMK M	609.048.900,00	190 UMK M	639.501.345,00	195 UMK M	639.501.345,00	195 UMK M		



					Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan												
				2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peningkatan kelas UMKM	-	601.178.890,00	185 UMK M	609.048.900,00	190 UMK M						
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan						639.501.345,00	195 Unit Usaha	639.501.345,00	195 Unit Usaha		
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	16.047.323.164,00	83	17.145.548.968,00	83,5	18.002.826.416,40	84	18.002.826.416,40	84	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	Denpasar



		Menengah Prov. Bali Melalui Dukungan Program/ Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja														
				2.17.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	-	165.444.786,00	3 dokumen	80.630.016,00	3 dokumen	84.661.516,80	3 dokumen	84.661.516,80	3 dokumen	
				2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	-	88.947.836,00	3 dokumen	78.417.006,00	3 dokumen					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						82.337.856,30	2 dokumen	82.337.856,30	2 dokumen	



				2.17.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rka-skpd	-	29.999.990,00	1 dokumen	-	-	-	-	0,00	-		
				2.17.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rka-skpd	-	4.499.760,00	1 dokumen	-	-	-	-	0,00	-		
				2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen dpa-skpd	-	4.499.900,00	1 dokumen	-	-	-	-	0,00	-		
				2.17.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan dpa-skpd	-	4.499.730,00	1 dokumen	-	-	-	-	0,00	-		
				2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	-	24.998.910,00	4 laporan	-	-	-	-	0,00	-		
				2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah program yang dievaluasi	-	7.998.660,00	7 program	2.213.010,00	1 dokumen						
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.323.660,50	1 dokumen	2.323.660,50	1 dokumen		
				2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan	-	10.811.287.094,00	4 layanan	12.898.307.722,00	1 layanan	13.543.223.108,10	75 Orang	13.543.223.108,10	75 Orang		



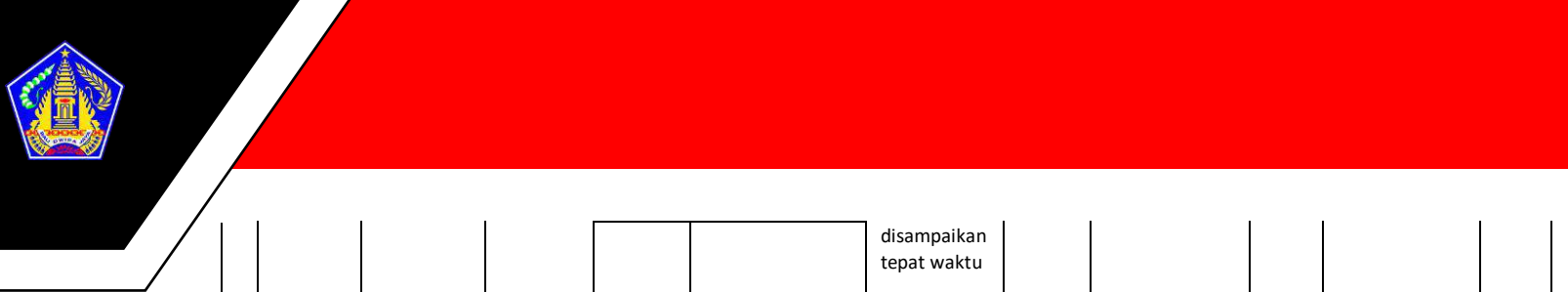
						n tepat waktu											
				2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	-	10.783.559.964,00	66 dokumen	12.898.307.722,00	14 dokumen						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						13.543.223.108,10	75 Orang	13.543.223.108,10	75 Orang		
				2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	-	14.591.120,00	12 laporan	-	-	-	-	0,00	-		
				2.17.01.1.02.06	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	-	9.200.700,00	12 dokumen	-	-	-	-	0,00	-		
				2.17.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	-	3.935.310,00	4 dokumen	-	-	-	-	0,00	-		
				2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik	-	276.823.020,00	6 layanan	96.895.770,00	6 layanan	101.740.558,50	5 Paket, 2 Laporan	101.740.558,50	5 Paket, 2 Laporan		



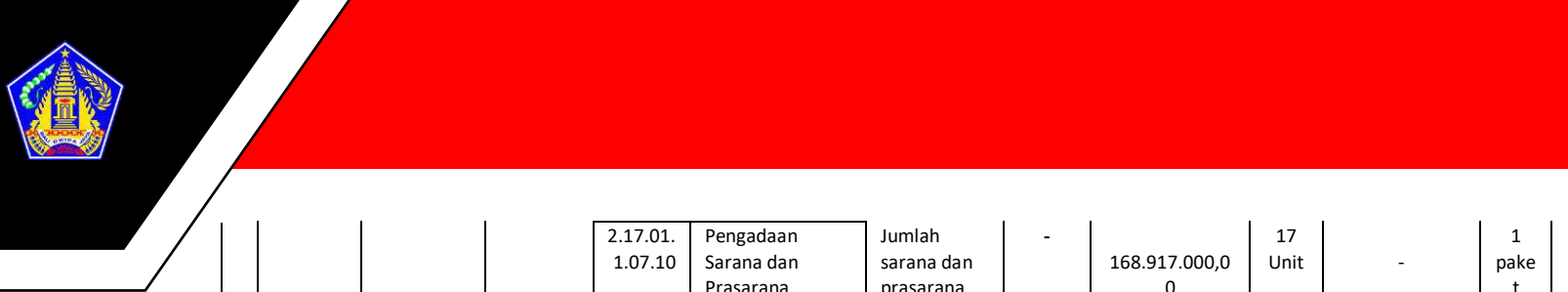
						dan disampaikan tepat waktu											
				2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	14.985.850,00	1 layanan	9.999.250,00	1 layanan						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						10.499.212,50	1 Paket	10.499.212,50	1 Paket		
				2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	64.997.170,00	1 layanan	64.931.520,00	1 layanan						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						68.178.096,00	1 Paket	68.178.096,00	1 Paket		



				2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan											
				2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	21.850.000,00	1 layanan	14.965.000,00	1 layanan						
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						15.713.250,00	1 Paket	15.713.250,00	1 Paket		
				2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	7.000.000,00	1 layanan	7.000.000,00	1 layanan						
												7.350.000,00	1 laporan	7.350.000,00	1 laporan		
				2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan	-	6.000.000,00	1 layanan	-	1 layanan						



						disampaikan tepat waktu										
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu										
				2.17.01. 1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	161.990.000,0 0	1 laya nan	-	1 laya nan					
						Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				2.17.01. 1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-	168.917.000,0 0	17 Unit	-	1 pake t	-	-	-	-	
				2.17.01. 1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan										



				2.17.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan	-	168.917.000,00	17 Unit	-	1 paket					
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan										
				2.17.01.1.08.	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	1.297.634.752,00	3 layanan	1.335.111.200,00	3 layanan	1.401.866.760,00	3 laporan	1.401.866.760,00	3 laporan	
				2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	2.000.000,00	1 layanan	2.000.000,00	1 layanan					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.100.000,00	1 Laporan	2.100.000,00	1 Laporan	



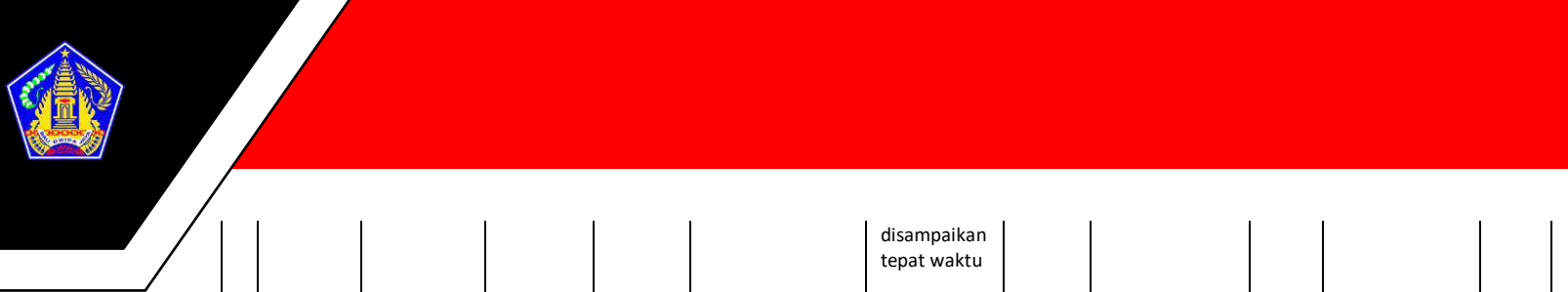
				2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	271.200.000,00	1 layanan	271.200.000,00	1 layanan					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						284.760.000,00	1 laporan	284.760.000,00	1 laporan	
				2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	1.024.434.752,00	1 layanan	1.061.911.200,00	1 layanan					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1.115.006.760,00	1 laporan	1.115.006.760,00	1 laporan	
				2.17.01.1.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-	1.012.411.628,00	6 Jenis	959.305.028,00	6 jenis	1.007.270.279,40	90 Unit	1.007.270.279,40	90 Unit	



					Pemerintahan Daerah												
				2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	-	781.939.736,00	2 jenis	729.460.536,00	2 jenis						
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						765.933.562,80	11 Unit	765.933.562,80	11 Unit		
				2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	-	50.000.000,00	3 jenis	50.000.000,00	2 jenis						
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						52.500.000,00	76 Unit	52.500.000,00	76 Unit		
				2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	180.471.892,00	1 unit	179.844.492,00	2 unit						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						188.836.716,60	3 Unit	188.836.716,60	3 Unit		



				2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	1.814.019.388,00	1 layanan	1.357.423.276,00	1 layanan	1.425.294.439,80	9 orang	1.425.294.439,80	9 orang		
				2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	-	1.814.019.388,00	14 dokumen	1.357.423.276,00	14 Dokumen						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						1.425.294.439,80	9 Orang	1.425.294.439,80	9 Orang		
				2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	38.099.260,00	5 layanan	4.416.220,00	5 layanan	4.637.031,00	1 paket	4.637.031,00	1 paket		
				2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan	-	2.499.600,00	1 layanan	689.500,00	1 layanan						



						disampaikan tepat waktu											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan					723.975,00	1 paket	723.975,00	1 pake t			
				2.17.01. 1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	7.399.860,00	1 laya nan	2.726.720,00	1 laya nan						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka n Kantor yang Disediakan					2.863.056,00	1 paket	2.863.056,00	1 pake t			
				2.17.01. 1.06.05	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	2.200.000,00	1 laya nan	1.000.000,00	1 laya nan						



					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						1.050.000,00	1 paket	1.050.000,00	1 paket		
				2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	1.000.000,00	1 layanan	-	1 layanan					
				2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	24.999.800,00	1 layanan	-	1 layanan					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				2.17.01.1.08.	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan	-	279.970.892,00	3 layanan	239.452.392,00	3 layanan	251.425.011,60	1 laporan	251.425.011,60	1 laporan	



						disampaika n tepat waktu											
				2.17.01. 1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	1.000.000,00	1 laya nan	1.000.000,00	1 laya nan						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.050.000,00	1 laporan	1.050.000,00	1 lapo ran		
				2.17.01. 1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-	48.500.000,00	1 laya nan	48.500.000,00	1 laya nan						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						50.925.000,00	1 laporan	50.925.000,00	1 lapo ran		
				2.17.01. 1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran	-	230.470.892,0 0	1 laya nan	189.952.392,0 0	1 laya nan						



						yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					199.450.011,60	1 laporan	199.450.011,60	1 laporan			
				2.17.01.1.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-	182.715.344,00	6 jenis	174.007.344,00	5 jenis	182.707.711,20	7 unit	182.707.711,20	7 unit		
				2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	-	77.612.448,00	2 jenis	95.784.448,00	2 jenis						
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					100.573.670,40	1 unit	100.573.670,40	1 unit			
				2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	-	14.950.000,00	3 jenis	3.270.000,00	2 jenis						



						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						3.433.500,00	5 unit	3.433.500,00	5 unit		
				2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	90.152.896,00	1 unit	74.952.896,00	1 unit						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						78.700.540,80	1 unit	78.700.540,80	1 unit		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Kegiatan, indikator, target kinerja yang disusun masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu asasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelahnya petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran



Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase (%)	87,42	87,92	88,42	88,92	89,42	89,92	89,92
11.2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah	312.967	313.467	313.967	314.467	314.967	315.467	315.467
11.3	Persentase peningkatan produktifitas koperasi	Persentase (%)	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,6

Tabel 7.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Capaian Setiap Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase (%)	88,29	87,42	79,75	79,90	68,94
11.2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah	300.650	312.967	326.009	327.353	412.265
11.3	Persentase peningkatan produktifitas koperasi	Persentase (%)	17,49	17,49	13,61	11,82	9,17



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali merupakan program pemberdayaan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada periode tahun 2018-2023. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kesiapan aparatur, kelembagaan, dan pendanaan, serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Cakupan dari Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UKM. Berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah diharapkan akan menjadi stimulus bagi percepatan kemajuan dan kemandirian koperasi dan UKM. Dukungan pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan koperasi dan UKM untuk merespon dinamika perkembangan perekonomian dan pasar baik di dalam maupun luar negeri. Pada saat yang sama Rencana Strategis yang telah disusun masih memiliki ruang untuk perbaikan sesuai dengan pencermatan terhadap perkembangan dan kebutuhan koperasi dan UKM.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini membutuhkan dukungan sistem pemantauan dan evaluasi (monev) yang kuat dan terintegrasi dengan partisipasi penuh dari unit-unit pelaksana program dan kegiatan. Sistem monev tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan dan konsistensi pelaksanaan Rencana Strategis ini, serta berkontribusi pada penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi juga perlu didukung sarana komunikasi dan basis data yang memadai. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali periode tahun 2018-2023 menjadi acuan kerjasama dan sinkronisasi program dan kegiatan bagi unit-unit pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis ini menjadi rujukan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan Gerakan Koperasi termasuk Dekopin untuk saling melengkapi dalam rangka meningkatkan kemandirian koperasi. Dukungan semua pihak baik dunia usaha maupun masyarakat juga diperlukan untuk kemajuan koperasi dan UKM di daerah Provinsi Bali.